

---

# EFEKTIVITAS PROGRAM DESA TANPA KEMISKINAN DALAM Mendukung *SUSTAINABEL DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) DI DESA BANGBAYANG KECAMATAN SITURAJA KABUPATEN SUMEDANG

Abdul Rozaq  
Universitas Sebelas April

---

## Article Info

### Article history:

Received Aug 28, 2024

Revised Des 12, 2024

Accepted Des 18, 2024

---

### Keywords:

Public Policy

Public Policy Implementation

Effectiveness Program

Sustainable Development Goals

---

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to determine the effectiveness of the Poverty-Free Village Program in Supporting the Sustainable Development Goals (SDGs) in Bangbayang Village, Situraja District, Sumedang Regency. The SDGs are an integrated effort to realize a poverty-free village.*

*The method used in this study is a qualitative method with a descriptive type. The informants were determined using the purposive sampling technique, so that five research informants were obtained, namely: Village Government Administration, Development Implementation, Community Empowerment, Community Development and Disaster Management. Data collection techniques are literature studies and field studies consisting of observation, interviews, and documentation. Meanwhile, data processing is carried out using data reduction, data display, and data conclusion drawing/verification. Based on the results of the study, it was concluded that measuring program effectiveness was seen from the accuracy of program goals, program socialization, program objectives, program monitoring has been running effectively but not optimally, because it is hampered by limited budgets so that it hinders to achieve program goals effectively. The inhibiting factors lie in budget mapping, human resources, support provided is not holistic, lack of understanding of SOPs, so efforts are made to increase the capacity of implementers through training and coordination with related parties to ensure holistic policies. Suggestions in this study include strengthening mechanisms to verify program goals, developing UMKM businesses, and strengthening collaboration to support more effective and sustainable empowerment.*



Copyright © 2024 JRPA. All rights reserved.

---

## Corresponding Author:

Abdul Rozaq

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jln. Angkrek Situ No 19 Kelurahan Situ - Sumedang.

Email: [arozaq2061@gmail.com](mailto:arozaq2061@gmail.com)

---

## 1. INTRODUCTION

Kemiskinan merupakan situasi dimana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yang tidak serta-merta akibat dari malas bekerja. Faktor sosial ekonomi yang melatarbelakangi situasi ini, seperti kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai, kondisi ekonomi negara, dan kebijakan politik negara. Kemiskinan merupakan masalah global dan menjadi hambatan sosial yang luas.

Dunia menanggapi permasalahan ini dengan pertemuan yang melahirkan deklarasi yang dikenal dengan The Millenium Development Goals (MDGs) pada September 2000 diikuti oleh 189 Negara. Deklarasi berisi MDGs berisi 8 tujuan utama yang diharapkan akan dapat tercapai pada tahun 2015. Upaya negara-negara dan komunitas internasional untuk mencapai tujuan pembangunan Tujuan MDGs sebagai serangkaian tujuan terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Menjelang berakhirnya MDGs pada tahun 2015, para negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sepakat untuk menyusun serangkaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang lebih menyeluruh. Pada tahun 2013, Majelis Umum PBB melakukan pembentukan kelompok kerja terbuka untuk mengembangkan proposal SDGs. Selanjutnya, pada tanggal 25 September 2015, Sidang Umum PBB secara resmi menetapkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030.

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah kepanjangan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 Tujuan dan 169 Target. 17 tujuan tersebut yaitu:

(1) Tanpa Kemiskinan (No Poverty); (2) Tanpa Kelaparan (Zero Hunger); (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Good Health and Well-Being); (4) Pendidikan Berkualitas (Quality Education); (5) Kesetaraan Gender (Gender Equality); (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak (Clean Water and Sanitation); (7) Energi Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean Energy); (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic Growth); (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (Industry, Innovation and Infrastructure); (10) Berkurangnya Kesenjangan (Reduced Inequalities); (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities); (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Responsible Consumption and Production); (13) Penanganan Perubahan Iklim (Climate Action); (14) Ekosistem Lautan (Life Bellow Water); (15) Ekosistem Daratan (Life On Land); (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (Peace, Justice and Strong Institutions); (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnerships For The Goals).

Dari 17 tujuan tersebut dikelompokkan dalam 4 (empat) Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan:

1. Pilar Pembangunan Sosial (mencakup pada tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5),
2. Pilar Pembangunan Ekonomi (mencakup pada tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17),
3. Pilar Pembangunan Lingkungan (mencakup pada tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15),
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (mencakup pada tujuan 16).

Setelah menerapkan pembangunan Internasional yang menitikberatkan pada Tujuan SDGs, Indonesia pada tahun 2017 mengintegrasikan SDGs ke dalam kerangka pembangunan nasional. Kemudian, pada tahun 2020, Kementerian Desa melalui Peraturan Menteri Desa No. 13 Tahun 2000 menerapkan inisiatif "SDGs Desa" sebagai acuan untuk membangun desa yang terfokus dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis SDGs ini diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat dari pembangunan yang dirancang sesuai dengan kondisi spesifik setiap desa, sehingga mencapai hasil yang bermanfaat secara maksimal.

PBB secara aktif mendorong dukungan terhadap SDGs, khususnya dalam menghapus kemiskinan. Negara-negara anggota mengakui SDGs sebagai inisiatif PBB yang berperan penting dalam menangani masalah pembangunan dan kehidupan secara global. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Indonesia telah menetapkan SDGs sebagai kerangka utama dalam pembangunan nasional, dengan fokus khusus pada pengentasan kemiskinan dan kelaparan di desa. Upaya ini dipimpin oleh Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, yang menargetkan peningkatan kesejahteraan di area pedesaan. Pengentasan kemiskinan adalah salah satu prioritas utama dalam SDGs dan dianggap sebagai tanggung jawab sebagai rasa kemanusiaan semua negara, terutama negara berkembang untuk mengatasi masalah ini dengan segera.

Permendes nomor 13 tahun 2020 menjadi dasar utama pembangunan desa untuk kesejahteraan maupun pendidikan yang berkualitas dalam kehidupan. Setiap penggunaan pembangunan diwajibkan SDGs Desa sebagai dasar arah pembangunan guna mengentaskan kemiskinan dan kelaparan serta pada kesejahteraan kehidupan masyarakat. Semua ini diharapkan dapat memudahkan pemerintah dalam mengawasi pembangunan dan memberikan intervensi terhadap pembangunan. Oleh karena itu, SDGs Desa dianggap sebagai dasar pembangunan prioritas pada tahun 2021.

Berdasarkan definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, kemiskinan merupakan situasi di mana individu atau keluarga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yang mencakup kebutuhan pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Angka

kemiskinan Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Angka TPT tahun ini tercatat 6,94% menurun dari tahun 2022 diangka 7,72% atau dibawah rata-rata Provinsi Jawa Barat sebesar 7,44%. Angka kemiskinan pada tahun 2023 ini menjadi 9,36% menurun 0,78% dari tahun 2022 yakni 10,14%.

Program desa tanpa kemiskinan merupakan salah satu bentuk dalam mendukung tujuan SDGs yang menggambarkan visi dimana setiap warga khususnya warga masyarakat Desa Bangbayang Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, tanpa terkecuali agar dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Desa Bangbayang adalah salah satu desa di Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, dengan luas wilayah 1026 Ha serta pemukiman dan pekarangan 10 Ha. Jumlah penduduk Desa Bangbayang sebanyak 937 jiwa yang terdiri dari 471 laki-laki dan 466 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 324 KK. Sedangkan jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 197 KK.

Mengatasi kemiskinan di Desa Bangbayang bukan hanya soal angka, melainkan bagaimana memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap peluang yang sama bebas dari kemiskinan dan dapat menikmati hidup yang bermartabat. Sehingga Desa Bangbayang membuat program untuk mengatasi kemiskinan, diantaranya yaitu:

1. RUTILAHU. Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat miskin dengan cara memperbaiki atau merenovasi rumah mereka yang dianggap tidak layak huni. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan menyediakan tempat tinggal yang sehat dan nyaman, serta mengurangi angka penyakit yang disebabkan oleh lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat atau tidak layak huni.
2. Bantuan langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah salah satu program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai atau bantuan pangan yang bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang kurang mampu.
3. Ketahanan Pangan. Ketahanan Pangan merupakan inisiatif pemerintah untuk memastikan kecukupan pangan bagi warga desa, mencapai kemandirian pangan di tingkat desa. Bantuan ini berupa pemberian hewan ternak berupa sapi bagi warga.

Keberhasilan suatu program dapat dilihat melalui pengukuran efektivitas, karena efektivitas menunjukkan tercapai atau tidaknya suatu program yang telah ditetapkan. Efektivitas sebagai perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program dapat dilaksanakan dengan baik. Efektivitas juga digunakan sebagai patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Suatu program dapat dikatakan berjalan secara efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti melihat indikasi atau fenomena masalah yang berkaitan dengan efektivitas program desa tanpa kemiskinan di Desa Bangbayang Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. Dalam mendukung sustainable development goals (SDGs) yang belum efektif, dengan indikasi-indikasi sebagai berikut:

1. Masih adanya masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, dari total jumlah kepala keluarga sebanyak 324 KK, terdapat 197 KK yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak keluarga di Desa Bangbayang yang memerlukan perhatian dan bantuan dari pemerintah.
2. Masih rendahnya daya beli sebagian masyarakat Desa Bangbayang, hal ini menunjukkan bahwa banyak warga yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Rendahnya daya beli disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tingkat penghasilan yang rendah, serta lapangan pekerjaan yang terbatas.
3. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dari pihak desa dalam peningkatan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa program dan inisiatif yang ada belum mampu mencapai hasil yang diharapkan. Faktor-faktor seperti kurangnya akses terhadap modal usaha, minimnya pelatihan keterampilan, serta keterbatasan infrastruktur dan teknologi menjadi penghambat utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Bangbayang.

## 2. METHOD

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut metode naturalistik, karena penilaiannya pada kondisi yang alamiah (natural setting) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

Sasaran penelitian ini yaitu Pemerintahan Desa di Kantor Desa Bangbayang Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Sasaran Penelitian**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1
2.	Sekretaris Desa	1
3.	Kepala Urusan Keuangan	1
4.	Kepala Urusan Umum	1
5.	Kepala Urusan Perencanaan	1
6.	Kepala Seksi Pelayanan	1
7.	Kepala Seksi Kesejahteraan	1
8.	Kepala Seksi Pemerintahan	1
9.	Kepala Kewilayahan	2
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>

Sumber: Desa Bangbayang, 2024

Menurut Moleong (2017) Informan adalah “Orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan latar penelitian”. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive sampling. Menurut Sugiyono (2023) *Purposive sampling* adalah “Teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan tertentu. Pertimbangannya adalah orang yang menguasai informasi dari obyek yang diteliti”.

SDGs yang sudah dilaksanakan di Desa adalah dalam bentuk pendataan yang mencakup kuisioner individu, RT, Desa, Keluarga adapun hasil output dari inputan tersebut menghasilkan rekomendasi kegiatan untuk 5 bidang kegiatan di Desa. Sehingga jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 5 orang. Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2. Subjek Penelitian**

No.	Unsur	Jumlah (Orang)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1
3.	Pemberdayaan Masyarakat	1
4.	Pembinaan Kemasyarakatan	1
5.	Penanggulangan Bencana	1
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan teknik pengumpulan data penelitian adalah untuk mendapatkan data. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2018) sebagai berikut:

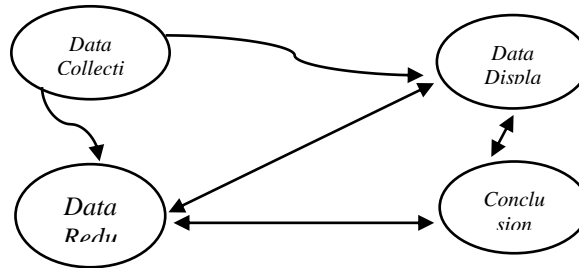
1. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menganalisis beragam literatur baik itu buku-buku ilmiah, dokumen, dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Studi lapangan, yaitu teknik yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian, diantaranya melalui Teknik berikut:
  - a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk mencatat segala kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dimana peneliti tidak ikut terlibat dalam proses kerja.
  - b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara meminta kepada berbagai pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, mendalam serta terarah sesuai dengan pedoman wawancara.
  - c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa foto-foto dengan catatan harian lapangan yang merupakan pelengkap hasil wawancara dan observasi.
  - d. Triangulasi, yaitu teknik pengolahan data yang bersifat menghubungkan dari berbagai teknik pengumpulan data serta sumber data yang telah ada. Bila peneliti mengumpulkan pengumpulan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu dengan mengecek kredibilitas data dengan berbagai Teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber

data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama.

Sugiyono (2018) menjelaskan pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas
2. Uji Transferabilitas
3. Uji Depenabilitas
4. Uji konfirmabilitas

Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, penelitian melakukan pengelolaan data yang dilakukan dengan mengacu kepada Teknik analisis dan model Miles dan Huberman (Sugiyono 2017: 246-253) yaitu sebagai berikut



**Gambar Prosedur Pengolahan Data**

Sumber: Sugiyono, 2018

### 3. RESULT AND DISCUSSION

Keberhasilan suatu program dapat dilihat melalui pengukuran efektivitas, karena efektivitas menunjukkan tercapai atau tidaknya suatu program yang telah ditetapkan tersebut. Efektivitas sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program dapat dilaksanakan dengan baik. Efektivitas juga digunakan sebagai patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Suatu program dapat dikatakan berjalan secara efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Desa Tanpa Kemiskinan berperan penting dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan pertama yaitu "Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Mana pun". Ketika masyarakat di Desa Bangbayang bebas dari kemiskinan, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup melalui akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Dengan mengurangi angka kemiskinan di Desa Bangbayang, dapat tercipta masyarakat yang lebih sejahtera yang berkelanjutan, sehingga kontribusi desa terhadap pencapaian keseluruhan SDGs menjadi signifikan.

Suatu program dikatakan efektif apabila penerapan itu dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Budiani (dalam Pertiwi dan Nurcahyanto 2017: 3) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program
2. Sosialisasi Program
3. Tujuan Program
4. Pemantauan Program

Berdasarkan penerapan diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mencerminkan sejauh mana program dapat dilaksanakan dengan baik dan digunakan sebagai patokan untuk membandingkan proses dengan hasil yang dicapai. Desa Tanpa Kemiskinan dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) dikatakan efektif jika tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Metode penelitian yang digunakan peneliti merupakan metode kualitatif, sehingga data yang disajikan dengan pengungkapan makna dari peneliti. Penelitian ataupun perbandingan sendiri dilakukan melalui pengembangan indikator variabel penelitian menjadi beberapa pertanyaan penelitian yang terakit dengan Program Desa Tanpa Kemiskinan Di Desa Bangbayang Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. Untuk penelitian ini, peneliti menetapkan 5 (lima) informan sebagai objek untuk diwawancara terakit Efektivitas Program Desa Tanpa Kemiskinan dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Bangbayang Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. Lima informan tersebut meliputi:

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Pemberdayaan Masyarakat

## 4. Pembinaan Kemasyarakatan

## 5. Penanggulangan Bencana

Hasil wawancara mengenai Efektivitas Program Desa Tanpa Kemiskinan dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Bangbayang Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, peneliti menguraikan sebagai berikut:

**Tabel 3. Kesimpulan Efektivitas Program Desa Tanpa Kemiskinan dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Bangbayang Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang**

No.	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
1.	Ketepatan sasaran	a. Mekanisme menetapkan sasaran	Untuk menetapkan sasaran dalam menurunkan angka kemiskinan sudah dengan data yang valid yang di tetapkan dari hasil musyawarah dengan RT, RW dan <i>stakeholder</i> yang ada.
		b. Kriteria sasaran	Kriteria sasaran program desa tanpa kemiskinan yaitu masyarakat yang belum bisa memenuhi kebutuhan pokok yang di dapat dari hasil musyawarah yang masuk DTKS dalam kriteria sangat miskin.
		c. Penerapan program yang tepat	Cara yang tepat agar penerapan program tepat pada sasaran ditentukan dari hasil musyawarah pihak-pihak terkait untuk mengidentifikasi kekurangan pada sasaran hingga nanti diterapkan bantuan seperti apa yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan.
2.	Sosialisasi program	a. Tujuan sosialisasi	Tujuan dari sosialisasi agar masyarakat mengetahui kriteria dalam program desa tanpa kemiskinan dan terhindar dari kecemburuan terkait bantuan yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.
		b. Manfaat sosialisasi	Selain menjalin silaturahmi dengan masyarakat disisi lain segala upaya yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan dapat tersampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui tentang program yang berjalan.
3.	Tujuan program	a. Kejelasan tujuan program	Selain untuk mendukung program pemerintah, keberhasilan dalam indikator menurunkan kemiskinan di SDGs yang memiliki 18 Tujuan untuk Desa dan 17 tujuan dalam skala Nasional disisi lain diharapkan ekonomi masyarakat dapat meningkat sehingga lebih sejahtera dan menjadikan desa lebih mandiri.
		b. Kegiatan sesuai dengan tujuan program	Program yang sudah dilaksanakan belum berjalan sesuai dengan rencana karena terhambat oleh faktor anggaran dan fasilitas yang masih kurang memadai untuk menunjang keberhasilan program.
4.	Pemantauan program	a. Adanya pengawasan dari pihak desa atau pihak	Dinas Sosial dan Aparat Desa memantau perilaku masyarakat serta

No.	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
		terkait	terus menganalisis bentuk sosialisasi yang dilakukan supaya mengetahui perkembangan program.
		b. Pelaksanaan efektif dan efisien	Terus melakukan pengawasan secara berkala kepada sasaran program serta melakukan pendampingan terhadap pelaksana program dan melakukan evaluasi kinerja agar pelaksanaan program desa tanpa kemiskinan berjalan secara efektif dan efisien.

Sumber: Hasil Wawancara dengan Informan Penelitian 2024

Dari uraian diatas, Efektivitas Program Desa Tanpa Kemiskinan dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Bangbayang Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang dikatakan sudah baik, diukur dengan menggunakan variabel-variabel efektivitas program menurut Budiani (dalam Pertiwi dan Nurcahyanto 2017) yaitu:

#### 1. Ketepatan sasaran

Dalam dimensi ketepatan sasaran untuk mengentaskan kemiskinan, khususnya kemiskinan di Desa Bangbayang dalam mendukung SDGs sudah tepat. Penetapan sasaran untuk menurunkan angka kemiskinan di Desa Bangbayang dilakukan berdasarkan data valid yang diperoleh dari hasil musyawarah dengan RT, RW, dan stakeholder terkait, dengan kriteria sasaran program "Desa Tanpa Kemiskinan" ditujukan kepada masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokok dan masuk dalam kategori sangat miskin di DTKS. Selanjutnya Agar penerapan program tepat sesuai kriteria, dilakukan musyawarah dengan pihak-pihak terkait untuk mengidentifikasi kekurangan pada sasaran dan menentukan jenis bantuan yang tepat dalam mengentaskan kemiskinan.

Ketepatan sasaran dalam efektivitas program merujuk pada sejauh mana program tersebut berhasil menjangkau serta memberikan manfaat kepada kelompok atau individu yang benar-benar membutuhkan. Ketika sasaran program sudah tepat, bantuan atau sumber daya yang disalurkan akan lebih efektif dalam mencapai tujuan program, serta mengurangi risiko dalam penyimpangan atau ketidak efisienan. Hal tersebut didukung oleh teori menurut Julia (dalam Martadani dan Hertati, 2019: 37) memberikan definisi bahwa "Efektivitas program dapat di rumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauhmana sasaran program yang telah ditetapkan".

Pendapat diatas terdapat keselarasan antara teori dengan kesimpulan, dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai dimensi ketepatan sasaran dikatakan Baik.

#### 2. Sosialisasi program

Sosialisasi program dalam Efektivitas Program Desa Tanpa Kemiskinan dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Bangbayang Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang di katakan baik karena sosialisasi di tujukan untuk memastikan masyarakat benar-benar memahami kriteria program "Desa Tanpa Kemiskinan" serta menghindari dari kecemburuan terkait bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada sasaran program. Sosialisasi juga memastikan bahwa upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan tersampaikan dengan baik agar tujuan dapat tercapai dengan efektif. Hal ini didukung oleh teori menurut Anderson sebagaimana (dalam Pramudiana, 2017: 3) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah "a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern" (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Pendapat diatas terdapat keselarasan antara teori dengan kesimpulan, dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai dimensi ketepatan sasaran dikatakan Baik.

#### 3. Tujuan program

Dilihat dari dimensi tujuan program dalam mendukung program pemerintah untuk keberhasilan dalam tujuan "Tanpa Kemiskinan" di SDGs disisi lain diharapkan ekonomi masyarakat dapat meningkat sehingga lebih sejahtera dan menjadikan desa lebih mandiri. Namun program yang sudah dilaksanakan belum berjalan sesuai dengan rencana karena masih terhambat oleh faktor anggaran yang masih kurang memadai untuk menunjang keberhasilan. Hal tersebut didukung oleh teori menurut Mukhopadhy (dalam Arsyad, 2010: 300) mengemukakan bahwa:

"Para pembuat kebijakan pembangunan selalu berupaya agar alokasi sumber daya dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakatnya. Namun, karena ciri dan kondisi masyarakat yang amat beragam ditambah pula dengan tingkat kemajuan ekonomi negara yang bersangkutan terkadang masih lemah".

Pendapat diatas terdapat keselarasan antara teori dengan kesimpulan, dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai dimensi tujuan program dikatakan belum baik karena belum tercapai secara maksimal.

#### 4. Pemantauan program

Dilihat pada dimensi pemantauan program untuk mengetahui Efektivitas Program Desa Tanpa Kemiskinan dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Bangbayang Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang di katakan sudah baik, karena adanya pemantauan dari pihak terkait seperti Dinas Sosial dan pemantauan dari pihak desa serta melakukan pengawasan secara berkala, pendampingan dan evaluasi guna memastikan pelaksanaan program desa tanpa kemiskinan berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Hal tersebut didukung oleh teori menurut Annash (2017: 79-80) menyatakan bahwa:

“Efektivitas dari penerapan program sangat mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai. Salah satu indikator yang menyatakan bahwa program tersebut sudah berhasil adalah tingkat efektivitasnya dari program tersebut sudah memberikan dampak sesuai dengan tujuan yang diinginkan”.

Pendapat diatas terdapat keselarasan antara teori dengan kesimpulan, dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai dimensi pemantauan program dikatakan Baik.

Efektivitas Program Desa Tanpa Kemiskinan di Desa Bangbayang sudah cukup baik dalam ketepatan sasaran, sosialisasi, dan pemantauan program, menunjukkan pendekatan yang tepat untuk mendukung tujuan "Tanpa Kemiskinan" dalam SDGs. Namun, keterbatasan anggaran menghambat perluasan cakupan program dan menyebabkan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan belum maksimal.

Faktor-faktor penghambat dalam Efektivitas Program Desa Tanpa Kemiskinan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Bangbayang Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang menghadapi hambatan signifikan dari berbagai aspek. Pertama dari dimensi isi kebijakan, pemetaan anggaran untuk mengentaskan kemiskinan yang kurang optimal dikarenakan anggaran yang terbatas mengakibatkan alokasi dana tidak efisien, sehingga program bantuan tidak mendapatkan dukungan finansial yang memadai. Selain itu, pada dimensi informasi, informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan program mengentaskan kemiskinan sering kali terhambat oleh pemahaman yang terbatas dari para pelaksana, sehingga mereka tidak sepenuhnya memahami atau mampu mengimplementasikan kebijakan secara efektif di Desa Bangbayang. Dimensi dukungan terhadap program ini juga terhambat oleh pendekatan yang tidak holistik dari pelaksana, di mana kebijakan yang diambil tidak mempertimbangkan semua aspek penting yang saling terkait dalam pengentasan kemiskinan dalam mendukung SDGs. Terakhir, dimensi pembagian potensi dan tugas di antara pelaksana sering kali tidak maksimal karena keterbatasan kemampuan mereka untuk memahami SOP yang berlaku, yang mengakibatkan pelaksanaan program berjalan lambat dan kurang terkoordinasi, sehingga menghambat efektivitas pencapaian tujuan program Desa Tanpa Kemiskinan.

Upaya untuk mengatasi hambatan Efektivitas Program Desa Tanpa Kemiskinan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Bangbayang Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang kebijakan yang sesuai harus ditentukan melalui musyawarah yang melibatkan semua pemangku kepentingan maupun masyarakat, sehingga relevan dengan kriteria sasaran program. Hambatan pemahaman pelaksana dapat diatasi dengan memberikan informasi yang valid dan pelatihan yang tepat. Koordinasi yang lebih baik diperlukan untuk memastikan kebijakan bersifat holistik dan melibatkan semua pihak terkait. Selain itu, peningkatan kapasitas pelaksana melalui pelatihan dan evaluasi rutin harus dilakukan untuk memastikan mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan program Desa Tanpa Kemiskinan dalam mendukung SDGs berjalan secara efektif.

#### 4. CONCLUSION

Efektivitas Program Desa Tanpa Kemiskinan Dalam Mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bangbayang Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang sudah cukup baik dalam dimensi ketepatan sasaran dilakukan dengan musyawarah untuk menetapkan maupun menganalisis kriteria sasaran, selanjutnya dimensi sosialisasi program yang berjalan juga sudah berjalan cukup baik, serta dimensi pemantauan program dilakukan secara berkala, menunjukkan bahwa program untuk mengentaskan kemiskinan ini sudah dirancang dan diimplementasikan dengan pendekatan yang tepat untuk mendukung tujuan Tanpa kemiskinan (*no poverty*) dalam SDGs. Meskipun langkah-langkah awal ini telah dilakukan dengan baik supaya berjalan dengan efektif. Namun, tujuan program belum terealisasi secara maksimal, di akibatkan terbatasnya anggaran untuk menjalankan program. Keterbatasan ini menghambat perluasan cakupan program dan pemetaan anggaran yang kurang efektif, sehingga dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan masih belum maksimal.

Faktor-faktor penghambat dalam Efektivitas Program Desa Tanpa Kemiskinan Dalam Mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bangbayang Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang



menghadapi hambatan signifikan dari berbagai aspek. Pertama dari dimensi isi kebijakan, pemetaan anggaran untuk mengentaskan kemiskinan yang kurang optimal dikarenakan anggaran yang terbatas mengakibatkan alokasi dana tidak efisien, sehingga program bantuan tidak mendapatkan dukungan finansial yang memadai. Selain itu, pada dimensi informasi, informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan program mengentaskan kemiskinan sering kali terhambat oleh pemahaman yang terbatas dari para pelaksana, sehingga mereka tidak sepenuhnya memahami atau mampu mengimplementasikan kebijakan secara efektif di Desa Bangbayang. Dimensi dukungan terhadap program ini juga terhambat oleh pendekatan yang tidak holistik dari pelaksana, di mana kebijakan yang diambil tidak mempertimbangkan semua aspek penting yang saling terkait dalam pengentasan kemiskinan dalam mendukung SDGs. Terakhir, dimensi pembagian potensi dan tugas di antara pelaksana sering kali tidak maksimal karena keterbatasan kemampuan mereka untuk memahami SOP yang berlaku, yang mengakibatkan pelaksanaan program berjalan lambat dan kurang terkoordinasi, sehingga menghambat efektivitas pencapaian tujuan program Desa Tanpa Kemiskinan.

Upaya untuk mengatasi hambatan Efektivitas Program Desa Tanpa Kemiskinan Dalam Mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bangbayang Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang kebijakan yang sesuai harus ditentukan melalui musyawarah yang melibatkan semua pemangku kepentingan maupun masyarakat, sehingga relevan dengan kriteria sasaran program. Hambatan pemahaman pelaksana dapat diatasi dengan memberikan informasi yang valid dan pelatihan yang tepat. Koordinasi yang lebih baik diperlukan untuk memastikan kebijakan bersifat holistik dan melibatkan semua pihak terkait. Selain itu, peningkatan kapasitas pelaksana melalui pelatihan dan evaluasi rutin harus dilakukan untuk memastikan mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan program Desa Tanpa Kemiskinan dalam mendukung SDGs berjalan secara efektif.

## REFERENCES

- Admosudiharjo, P., 2017, Manajemen Sumber daya Manusia, Bumi aksara, Jakarta.
- Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Akadun. (2019). Administrasi Perusahaan Negara. Bandung: Alfabeta.
- Alif, M. N. (2010). Teori Makro Ekonomi Islam. Bandung: Alfabeta.
- Alisjahbana, A. S., and Murniningtyas, E. (2018): Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, 3, 111–113
- Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Armida Salsiah Alisjahbana, E. M. (2018). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target, dan Strategi Implementasi. Bandung: Unpad Press.
- Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan, Edisi 5. UPP STIM YKPN.
- Bappenas (2020): Metadata Sustainable Development Goals Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, 1–133.
- Indahingwati, Asmara dan Nugroho, Novianto Eko. 2020. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka.
- Keban, Yeremias T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu, Ed.3. Yogyakarta: Gava Media.
- Kemendes PDTT (2022): Buku panduan desa peduli penghidupan berkelanjutan, 1–59.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Revisi). Bandung: PT remaja rosdakarya.
- Mufiz, Ali. 2016. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Pasolong, D. H. (2016). MS (2016). Metode Penelitian Administrasi Publik (Mei 2016). Alfabeta, cv.
- Pasolong, Harbani. (2017). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2019. teori admistrasi publik. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta. Sugiyono. 2023. metode penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang .1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik: Jakarta. Sinar Grafika.
- Syafri, W. (2012). Studi Tentang Administrasi Publik. Indonesia: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Tahir, A. (2014). Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Arifin Tahir.